

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Profil Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Badan Pusat Statistik beralamat di Jl. H. Saberan Effendi, RT. 3, Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71414.

Secara geografis wilayah Kantor Badan Pusat Statistik berlokasi di tempat yang tidak jauh dari pusat perkotaan dan terletak di pinggir jalan yang strategis yaitu di Jl. H. Saberan Effendi, RT. 3, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada koordinat - 2.419215, 115.246574. Pada sebelah Utara bangunan Kantor BPS Hulu Sungai Utara berbatasan dengan toko Copyku Stationery, sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga, sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Citra Permata Sari (CPS), dan sebelah Selatan berbatasan Jl. H. Saberan Effendi dan Ruko kosong.

2. Struktur Organisasi dan Data Kepegawaian

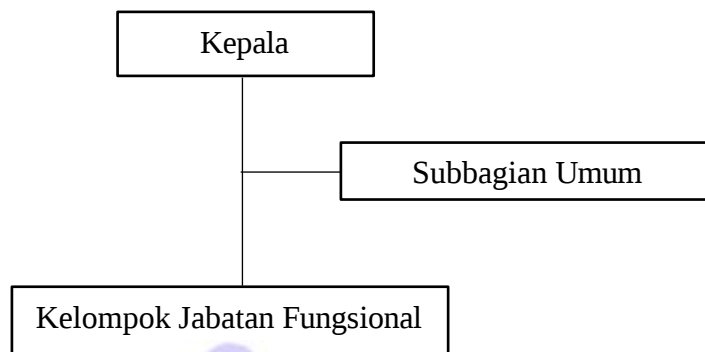
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka formal yang dirancang untuk menentukan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Robbins menekankan bahwa struktur organisasi tidak hanya berfungsi sebagai bagan yang menunjukkan hubungan antarindividu atau bagian, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur pola interaksi,

alur wewenang, dan tanggung jawab di dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap anggota dapat memahami posisi, peran, serta garis koordinasi yang harus dijalankan, sehingga potensi terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun konflik kepentingan dapat diminimalisir. Struktur organisasi juga membantu menciptakan keteraturan dalam proses kerja, mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan tujuan organisasi, serta menjadi sarana penting dalam pembagian sumber daya secara efektif. Dengan demikian, struktur organisasi pada dasarnya adalah alat manajerial yang memastikan seluruh aktivitas berjalan harmonis dan selaras dengan visi serta misi organisasi (Stephen P. Robbins:2006). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara bukan termasuk pemerintah daerah atau dinas instansi pertikal dimana suatu struktur organisasi sudah terbentuk dari instruksi pusat, dimana semua pegawai menjadi fungsional. Struktur organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Kepala
- 2) Subbagian Umum
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi



b. Uraian Tugas

1) Kepala

Pimpinan tertinggi di BPS tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik di wilayah kerjanya. Kepala Kantor memimpin, mengatur, dan mengawasi kegiatan teknis dan administrasi, serta menjadi penanggung jawab utama terhadap hasil dan kualitas data yang dihasilkan BPS.

2) Subbagian Umum

Subbagian umum adalah bagian yang bertugas mengelola administrasi umum. Tugasnya meliputi pengelolaan administrasi perkantoran seperti surat-menyurat dan dokumentasi, pengelolaan kepegawaian, penyusunan dan pelaporan keuangan, pengadaan serta pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas kantor, serta pengelolaan arsip sebagai sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban kegiatan BPS.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi-fungsi tertentu sesuai keahlian dan keterampilan, yang pelaksanaannya didasarkan pada keahlian professional untuk mendukung tugas dan fungsi instansi.

c. Data Kepegawaian

Tabel 4. 1
Data Pegawai Kantor Badan Pusat Statistik

No	NAMA/NIP	JABATAN	GOL
1.	Agus Salim, SST, M.P. (197508081993121001)	Kepala BPS	IV/a
2.	Arfiani, S.Si (198112042011011009)	Kepala Subbagian Umum	III/d
3.	M. Agus Suharyanto, A.Md (198810052011011007)	Statistisi Pelaksana Lanjutan	III/c
4.	Masdani, SE (197110181983121001)	Statistisi Muda	III/d
5.	Muhammad Imam Sholihin, S. Tr. Stat. (199711142021041001)	Statistisi Pertama	III/a
6.	Rusni (196905102006041022)	Statistisi Pelaksana	II/d
7.	Taufik Ilhakim (196807052007011006)	Pengolah Data	II/d
8.	Abu Hurairah (198108232002121005)	Statistisi Penyedia	III/d
9.	Azehir, SE. (196902091993121001)	Pengolah Data	III/d
10.	Agusriadi (197708062007101001)	Statistisi Pelaksana Lanjutan	III/b
11.	Herliani (197504112009012005)	Statistisi Pelaksana Lanjutan	III/c
12.	Ghytsa Alif Jabir, S. Tr. Stat (199812242022011002)	Statistisi Pertama	III/a
13.	Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat. (199806202022011002)	Statistisi Pertama	III/a
14.	Faizal Ramli, S. Tr. Stat. (199902252022011004)	Statistisi Pertama	III/a
15.	Ariq Rizaldi Fadhlurrahman, S. Tr. Stat	Pranata Komputer Pertama	III/a

No	NAMA/NIP	JABATAN	GOL
	(200004212023021006)		
16.	Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md. Stat. (200006262023022001)	Statistisi Terampil	II/c
17.	Ridha Hanindya Witari, S. Tr. Stat. (200007092023022003)	Statistisi Pertama	III/a
18.	Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat (200102202023102002)	Pranata Komputer	III/a
19.	Fitri Yulianti, S. Tr. Stat (199602132019012001)	Statistisi Pertama	III/b
20.	M. Sairaji, A.Md.Kom (199702212024211001)	Prana Komputer Terampil	VII
21.	Putri Ramatillah Ramadhana, S. Tr. Stat. (200111202024122001)	Staff BPS Kabupaten/Kota	III/a
22.	Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md. Stat. (200306112024122002)	Staff BPS Kabupaten/Kota	II/c II/
23.	Fibrina Sriliana, SP	Penata Operasional Layanan Perkantoran	IX
24.	M. Effatur Rahman, S.Pd.I	Penata Operasional Layanan Perkantoran	IX

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

3. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Visi

Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju.

b. Misi

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

4. Sarana Prasarana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam rangka mencapai maksud atau tujuan suatu kegiatan. Dengan kata lain, sarana merupakan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas. Misalnya, dalam dunia pendidikan, sarana mencakup buku, alat tulis, meja, kursi, dan berbagai fasilitas yang digunakan langsung oleh peserta didik maupun pengajar untuk menunjang proses belajar-mengajar

b. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang terselenggaranya suatu proses kegiatan, namun memiliki peran penting sebagai pendukung utama. Prasarana biasanya bersifat lebih permanen dan menjadi dasar berlangsungnya aktivitas.

Tabel 4. 2
Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Badan Pusat Statistik

Nama	Jumlah
A.C. Split	11
Alat Bantu Uji Tumbuh	28
Alat Penampi	5
Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	4
Auto Switch/Data Switch	1
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
Bracket Standing Peralatan	1
Brandkas	1

Nama	Jumlah
Camera Conference	4
CCTV - Camera Control Television System	10
Crimping Tolls	1
Digital Thermometer	1
Dispenser	2
External	1
Filing Cabinet Besi	7
Firewall	1
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
Gedung Pos Jaga Permanen	1
Gordyin/Kray	1
Hard Disk	1
Karpet	4
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1
Kipas Angin	4
Kursi Besi/Metal	99
Kursi Fiber Glas/Plastik	12
Laci Box	1
Lap Top	11
LCD Projector/Infocus	1
Lemari Besi/Metal	3
Lemari Display	2
Lemari Kayu	22
Loudspeaker	1
Meja Kerja Besi/Metal	13
Meja Kerja Kayu	37
Meja Komputer	15
Meja Rapat	13
Meja Resepsionis	2
Mesin Absensi	2
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	11
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
Microphone Cable	1
Microphone/Boom Stand	2
Microphone/Wireless MIC	2
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
Neraca Dengan Digital Display	2

Nama	Jumlah
Network Monitoring System	1
Note Book	2
P.C Unit	19
Pagar Permanen	1
PC Workstation	1
Pompa Air	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	13
Rak Besi	6
Rak Kayu	4
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
Sepeda Motor	1
Serial Lainnya	1047
Sice	1
Software Komputer	5
Switch	1
Tabung Pemadam Api	2
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1
Tangga Aluminium	1
Telepon Digital	1
Thermometer Gun	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	18
Unit Power Supply	2
Vertikal Blind	64
Total	1546

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara 09 Agustus 2025

B. Efektivitas Pengelolaan Arsip pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori efektivitas pengelolaan arsip yang relevan, khususnya model yang dikemukakan oleh Muslichah (2019:51) dengan enam indikator ketentuan terkait dengan pengelolaan kearsipan,

pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan arsip pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan. Analisis ini tidak hanya menguraikan proses pengelolaan arsip yang berjalan selama ini, tetapi juga meninjau berbagai faktor pendukung serta kendala yang memengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan arsip di instansi tersebut. Melalui pendekatan tersebut, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kearsipan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan enam indikator menurut Muslichah yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem kearsipan, kebijakan kearsipan, dana atau anggaran, sosialisasi dan apresiasi kearsipan.

1. Sumber Daya Manusia

Merupakan seluruh individu yang terlibat dalam suatu organisasi dan memiliki peran, kemampuan, serta tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap kerja yang dimiliki oleh pegawai yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan.

a. Pelatihan

Pelatihan yang diterima pegawai mengenai prosedur, teknik, dan standar pengelolaan arsip menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan kearsipan di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tanpa pelatihan yang memadai, pegawai berpotensi tidak mampu menata, menyimpan, atau

memelihara arsip sesuai prosedur dan standar yang berlaku, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“pelatihan kearsipan yang telah diselenggarakan selama ini hanya diikuti oleh pegawai dari Subbagian Umum. Selain itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini belum memiliki arsiparis khusus yang menangani kearsipan, yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Beberapa pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengikuti pelatihan kearsipan. Pelatihan tersebut khusus diikuti oleh pegawai yang terlibat langsung di Subbagian Umum. Saat ini, pengelolaan arsip masih menjadi tanggung jawab Subbagian Umum, karena hingga saat ini belum tersedia arsiparis khusus. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum adanya alokasi pegawai khusus untuk posisi arsiparis di BPS Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara pernah mendapatkan pelatihan, tinggal mengoptimalkan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Baru-baru ini memang diadakan pelatihan, namun yang mengikuti pelatihan hanya pegawai dari subbagian umum, karena subbagian umum yang menangani kearsipan. Saat ini, pengelolaan arsip masih dilakukan oleh subbagian umum dan belum ada arsiparis khusus, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk pelatihan khusus terkait kearsipan, sejauh ini belum pernah diadakan. Namun, sesekali pegawai mengikuti kegiatan sosialisasi kearsipan yang diselenggarakan di tingkat provinsi.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, pelatihan tersebut pernah diselenggarakan. Namun, saya pribadi tidak ikut karena baru bergabung di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sebagian pegawai pernah mengikuti pelatihan, sementara yang lain belum pernah mengikuti pelatihan memperoleh informasi melalui kegiatan berbagi ilmu (sharing knowledge) di lingkungan kerja.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelatihan khusus terkait kearsipan belum pernah diselenggarakan. Kegiatan yang ada berupa briefing atau sosialisasi yang biasanya diadakan oleh pihak provinsi, dan peserta yang hadir terbatas pada pegawai terpilih yang menangani arsip.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pernah diadakan kegiatan terkait kearsipan di tingkat provinsi. Karena di BPS HSU kami tidak memiliki jabatan khusus untuk kearsipan, peserta yang hadir merupakan pegawai yang ditunjuk oleh kepala unit untuk mengikuti kegiatan tersebut.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, belum pernah diselenggarakan pelatihan khusus di bidang kearsipan.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pernah diselenggarakan pelatihan terkait kearsipan, namun hanya diikuti oleh pegawai yang secara langsung menangani arsip, tidak oleh seluruh pegawai.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran

di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara belum pernah diselenggarakan pelatihan terkait kearsipan, kegiatan semacam itu hanya ada di tingkat provinsi. Selain itu, pengelolaan arsip belum memiliki arsiparis khusus karena keterbatasan sumber daya manusia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum pernah ada pelatihan khusus kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (November, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Pelatihan kearsipan yang pernah dilaksanakan umumnya hanya diikuti oleh pegawai Subbagian Umum sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip. Beberapa pegawai memperoleh pengetahuan kearsipan melalui pelatihan atau sosialisasi di tingkat provinsi maupun melalui kegiatan berbagi ilmu (sharing knowledge) di lingkungan kerja, sehingga pemahaman dasar kearsipan hanya dimiliki oleh pegawai tertentu.

Namun, pelatihan kearsipan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pegawai karena sebagian besar pegawai

dari unit lain tidak pernah mengikuti pelatihan kearsipan secara langsung. Selain itu, pelatihan kearsipan belum diselenggarakan secara rutin di tingkat kabupaten dan belum didukung oleh keberadaan arsiparis khusus akibat keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman pegawai mengenai kearsipan belum merata dan masih terbatas.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara juga kurang efektif. Kegiatan pengelolaan arsip yang berlangsung lebih berfokus pada penyelesaian pekerjaan administratif sehari-hari tanpa disertai pelatihan kearsipan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan kearsipan sepenuhnya dibebankan kepada Subbagian Umum dan belum didukung oleh arsiparis khusus, sehingga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kearsipan pegawai menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan masih kurang efektif. Pelatihan kearsipan belum dilaksanakan secara rutin, cakupan peserta masih terbatas, serta belum didukung oleh keberadaan arsiparis khusus. Kondisi ini menyebabkan pelatihan kearsipan belum mampu meningkatkan kompetensi pegawai secara menyeluruh dan berkelanjutan,

sehingga belum memberikan dampak optimal terhadap kualitas pengelolaan arsip di lingkungan instansi tersebut.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Arsiparis, yaitu pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam pengelolaan arsip merupakan komitmen dan kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kearsipan sesuai dengan fungsi, wewenang, serta prosedur yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini mencakup ketelitian dalam penataan, ketepatan dalam penyimpanan, serta kepedulian dalam pemeliharaan arsip agar tetap terjaga keutuhan, keamanan, dan keteraksesannya. Tanpa adanya tanggung jawab yang kuat, pelaksanaan kegiatan kearsipan berpotensi tidak berjalan secara sistematis, sehingga meningkatkan risiko kesalahan, kehilangan, ataupun kerusakan arsip yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Selama ini pengelolaan arsip sudah berjalan dengan baik dan tertata rapi meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Kami tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola arsip bersama seluruh pegawai. Meskipun secara fungsi kearsipan bukan merupakan tugas utama mereka, namun

kami tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan agar setiap pegawai mampu menata serta melakukan pengarsipan secara rapi dan sesuai ketentuan.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, kami bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Saat ini, penataan dan pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai tertata dengan lebih baik seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia yang tersedia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pegawai di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terbiasa menata arsip dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa arsip tertata dengan rapi sehingga dapat mendukung kelancaran proses administrasi di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip selama ini berjalan dengan baik. Apabila Kasubbag Umum memerlukan arsip dari masing-masing pegawai, kami selalu siap menyediakan arsip tersebut. Arsip yang diminta akan disampaikan sesuai kebutuhan, terutama apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Secara keseluruhan, seluruh pegawai telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan administrasi, sehingga mendukung keteraturan dalam pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan arsip, dengan selalu memastikan dokumen tertata rapi dan dapat diakses sesuai kebutuhan administrasi.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, pengelolaan dan penataan arsip berjalan dengan aman. Pegawai melaksanakan tugas kearsipan secara cermat, sehingga arsip tetap terjaga keutuhannya dan dapat mendukung kelancaran administrasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip telah dilakukan dengan baik, selaras dengan SOP yang berlaku, sehingga setiap dokumen dapat ditata dan diakses secara efisien.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Setiap pegawai melaksanakan tanggung jawabnya sesuai bagian masing-masing, sehingga seluruh proses kearsipan dapat terlaksana secara tertib dan terkoordinasi.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip saat ini masih kurang maksimal, karena belum adanya arsiparis yang secara khusus bertugas memberikan arahan dan pengawasan. Hal ini menyebabkan beberapa arsip tidak langsung ditata sesuai prosedur, misalnya masih diletakkan di atas meja, sehingga berpotensi hilang atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip saat ini sudah mulai terkoordinasi dengan baik, karena penanganannya kini berada di bawah pengawasan Kasubag Umum. Hal ini membantu memastikan arsip ditata sesuai prosedur dan meminimalkan risiko kesalahan atau kehilangan dokumen.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip saat ini sudah berjalan dengan baik, dengan pegawai yang melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab, sehingga mendukung kelancaran

administrasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penataan dokumen tertib, aman, dan mendukung kelancaran administrasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup efektif. Pemerintah instansi, khususnya melalui peran Subbagian Umum, secara berkelanjutan melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai agar mampu menata dan mengelola arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai di setiap unit kerja telah terbiasa menata arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga arsip dapat tertata rapi dan mendukung kelancaran proses administrasi. Selain itu, apabila arsip diperlukan untuk keperluan pelaporan atau administrasi, pegawai dapat menyediakan dokumen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pimpinan.

Namun demikian, tanggung jawab pengelolaan arsip belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum tersedianya

arsiparis khusus yang menangani kearsipan secara profesional. Kondisi tersebut menyebabkan dalam praktiknya masih ditemukan arsip yang belum langsung ditata sesuai prosedur dan masih memerlukan pengawasan lebih lanjut, sehingga pemahaman dan keterampilan kearsipan pegawai belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menunjukkan keterbatasan dalam aspek teknis dan pengawasan, sehingga efektivitasnya tergolong cukup efektif. Pengelolaan arsip masih terfokus pada penyelesaian pekerjaan administratif sehari-hari dan berada di bawah koordinasi Subbagian Umum. Meskipun arsip telah ditata sesuai SOP dan dapat diakses dengan baik, belum adanya arsiparis khusus menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan kearsipan belum berjalan secara maksimal.

Akibatnya, meskipun pengelolaan arsip telah berjalan tertib dan mendukung administrasi, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pemerataan pemahaman kearsipan dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tanggung jawab pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan cukup efektif.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa menduduki jabatan fungsional arsiparis, serta mempunyai fungsi, tugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

2. Prasarana dan Sarana

Prasarana kearsipan terdiri dari gedung dan ruang. Gedung arsip harus memenuhi standar minimal gedung arsip yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun isi informasinya. Ruang-ruang dirancang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan proses penyelenggaraan kearsipan. Ruang tersebut minimal terdiri dari ruang kerja pegawai, ruang pengolah arsip, ruang simpan arsip, ruang pemeliharaan dan perawatan arsip, serta ruang layanan arsip.

a. Ruang Kerja Pegawai

Ruang kerja pegawai merupakan fasilitas fisik yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai dalam organisasi. Kondisi ruang kerja, termasuk ketersediaan meja, kursi, pencahayaan, ventilasi, dan tata letak yang ergonomis, memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan konsentrasi pegawai dalam menjalankan kegiatan operasional. Ruang kerja yang memadai dan terorganisir dengan baik juga berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan arsip, karena memudahkan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara tertib dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kondisi sarana dan prasarana saat ini dapat dikatakan kurang memadai. Dengan jumlah pegawai yang ada, diperlukan perluasan gedung agar ruang gerak dapat lebih optimal. Saat ini, kami telah mengajukan usulan ke pusat terkait perluasan gedung tersebut.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya, dari segi prasarana, kondisi masih tergolong kurang memadai. Sarana yang ada cukup, namun terbilang pas-pasan karena luas bangunan yang terbatas.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang kerja pegawai secara keseluruhan masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya fasilitas, seperti kursi. Saat ini, ruang kerja masih cukup untuk operasional, namun masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan lebih lanjut agar dapat lebih memadai bagi kebutuhan pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang kerja pegawai tergolong cukup memadai. Fasilitas seperti komputer, meja, dan kursi telah tersedia

dengan memadai, di mana setiap pegawai memperoleh satu unit PC masing-masing.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Bagian teknis di bawah secara fasilitas sudah memadai. Namun, ruang kerja saat ini digabung sehingga tidak lagi terbagi per seksi seperti sebelumnya, melainkan sudah bercampur menjadi satu.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Kondisi ruang kerja masih tergolong kurang memadai, karena bangunan yang ada terlalu sempit dan belum dimanfaatkan secara optimal.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, kondisi ruang kerja dirasakan cukup nyaman. Namun, idealnya, ruang kerja dapat ditingkatkan lagi agar lebih nyaman bagi pegawai.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk sementara, fasilitas ruang kerja dirasakan cukup dan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, ruang kerja pegawai saat ini telah sesuai dengan standar yang seharusnya, sehingga dapat dikatakan cukup baik.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“ruang kerja sudah cukup memadai, namun ketersediaan komputer masih kurang.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang kerja pegawai saat ini bersifat terbuka. Sebelumnya masih dibagi per sekat, namun sekarang sudah sejajar, sehingga koordinasi antarpegawai menjadi lebih mudah. Secara umum, ruang kerja sudah cukup memadai, meskipun koordinasi antara bagian administrasi dan subbagian umum masih sedikit terkendala karena harus berpindah ke lantai 2.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini ruang kerja dirasa cukup memadai. Namun apabila terjadi penambahan jumlah pegawai, ruang yang tersedia kemungkinan akan menjadi kurang.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang kerja saat ini tergolong cukup memadai, namun terdapat banyak fasilitas yang perlu diperbaharui agar lebih optimal.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas ruang kerja dan sarana prasarana di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerja pegawai, termasuk kegiatan kearsipan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa fasilitas kerja yang tersedia masih mampu menunjang aktivitas kerja sehari-hari, serta tata ruang terbuka dinilai dapat mempermudah koordinasi antarpegawai. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada umumnya masih dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas ruang kerja dan sarana prasarana belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan luas bangunan, penggabungan ruang kerja antar seksi, serta keterbatasan dan perlunya pembaruan fasilitas tertentu menjadi faktor yang berpotensi menghambat kelancaran kerja. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas kerja pegawai apabila terjadi peningkatan beban kerja atau penambahan jumlah pegawai di masa mendatang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang kerja dan sarana prasarana di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Tata ruang yang sempit dan belum tertata secara optimal menyebabkan ruang gerak pegawai terbatas, sehingga

aktivitas kerja, termasuk pengelolaan arsip, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung dan belum optimalnya pemanfaatan ruang yang tersedia mengakibatkan efektivitas penggunaan ruang kerja belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas ruang kerja dan sarana prasarana di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif, masih memerlukan pengembangan dan penataan lebih lanjut agar dapat mendukung kinerja pegawai secara lebih maksimal.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Prasarana kearsipan terdiri dari gedung dan ruang. Gedung arsip harus memenuhi standar-minimal gedung arsip yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun isi informasinya.

b. Ruang Simpan Arsip

Ruang simpan arsip merupakan fasilitas khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip secara teratur, aman, dan sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku. Ruang ini dirancang untuk mendukung proses penataan dan penyimpanan arsip agar mudah diakses, terlindungi, serta terjaga keutuhannya. Kondisi ruang simpan arsip umumnya mencakup ketersediaan rak atau lemari arsip, pengaturan suhu dan kelembapan,

pencahayaan yang memadai, serta sistem keamanan yang mampu mencegah kerusakan, kehilangan, atau akses tidak sah terhadap arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Apabila dioptimalkan, fasilitas tersebut sebenarnya sudah cukup memadai. Oleh karena itu, kami berupaya melakukan penataan, dan diharapkan pada tahun depan kondisi ruang tersebut sudah lebih rapi. Untuk saat ini, menurut saya fasilitas yang ada sudah cukup.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum, karena saat ini ruang arsip masih digabungkan dengan ruang persediaan. Namun demikian, kami berencana melakukan pembenahan pada tahun mendatang. Pada dasarnya, ruang arsip telah tersedia, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan ruang yang dimiliki.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang penyimpanan arsip saat ini masih belum memadai karena belum tersedia ruang khusus untuk penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan yang ada relatif sempit sehingga tidak dapat menampung seluruh arsip yang dimiliki. Kapasitas ruang arsip saat ini telah terisi sekitar 80%. Apabila ditambah dengan arsip non-keuangan, ruang tersebut tidak lagi memungkinkan untuk menyimpan seluruh arsip secara efektif dan aman.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum memadai, karena ruang tersebut belum mampu menampung seluruh arsip. Oleh karena itu, masing-masing pegawai atau ketua tim menyimpan arsipnya secara mandiri, sehingga apabila diperlukan barulah arsip tersebut diambil.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang arsip saat ini masih belum memadai karena kondisi gedung yang kurang tertata. Ke depan, kami berencana melakukan perluasan gedung agar dapat menyediakan ruang arsip yang lebih layak dan sesuai kebutuhan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Belum memadai, karena ruang arsip yang tersedia saat ini sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam menata dan menyimpan arsip secara optimal, sehingga perlu adanya penataan ulang atau penambahan ruang arsip yang lebih luas.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang simpan arsip yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menampung seluruh arsip yang ada, sehingga penyimpanan arsip menjadi kurang optimal dan memerlukan penambahan kapasitas atau penataan ulang ruang arsip.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum, karena ruang arsip memerlukan kriteria dan standar tertentu agar dapat mendukung penyimpanan arsip secara aman dan tertata. Hal ini mencakup aspek luas ruangan, pengaturan suhu dan kelembapan, keamanan, serta kemudahan akses yang sesuai dengan prosedur kearsipan yang berlaku.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang penyimpanan arsip saat ini belum memadai untuk menampung seluruh arsip yang ada, karena keterbatasan luas ruang yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya perluasan fasilitas penyimpanan.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang arsip yang tersedia saat ini kurang memadai karena masih tercampur dengan penyimpanan ATK, perlengkapan pembersih toilet, dan berbagai barang lainnya, sehingga belum berfungsi sebagai ruang arsip yang khusus.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk sementara ini ruang yang tersedia masih mencukupi. Namun, ke depan saya memperkirakan ruang tersebut akan menjadi kurang memadai, terutama mengingat akan dilaksanakannya sensus besar.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini ruang yang tersedia dapat dikatakan cukup memadai. Namun, ke depannya direncanakan akan dilakukan penambahan atau perluasan ruang agar kapasitas penyimpanan dan pengelolaan arsip dapat lebih optimal.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang arsip saat ini belum memadai karena belum tersedia ruang khusus untuk penyimpanan arsip. Ruangan yang digunakan masih bercampur dengan berbagai keperluan lain, sehingga belum dapat berfungsi optimal sebagai ruang arsip.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ruang simpan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Meskipun fasilitas yang tersedia dinilai cukup oleh pimpinan apabila ditata dengan baik, pada kenyataannya ruang arsip belum memadai karena belum tersedia ruang khusus, kapasitas penyimpanan terbatas, serta masih bercampur dengan ruang dan barang lain. Akibatnya, sebagian arsip disimpan oleh masing-masing pegawai sehingga penataan arsip belum terpusat.

Berdasarkan hasil observasi, kondisi ruang arsip juga belum mendukung pengelolaan arsip yang baik. Ruang

penyimpanan terlihat sempit, hampir penuh, dan belum memenuhi standar kearsipan. Hal ini menyebabkan penyimpanan dan penataan arsip belum berjalan dengan baik, sehingga pengelolaan arsip belum dapat mendukung pekerjaan administrasi secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Ruang arsip belum memadai karena belum tersedia ruang khusus, kapasitas penyimpanan terbatas, dan masih bercampur dengan keperluan lain. Kondisi tersebut menyebabkan penyimpanan arsip belum tertata dengan baik dan sebagian arsip masih disimpan oleh masing-masing pegawai, sehingga pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Ruang-ruang harus dirancang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan proses penyelenggaraan kearsipan.

c. Ruang Pemeliharaan dan Perawatan Arsip

Ruang pemeliharaan dan perawatan arsip merupakan fasilitas yang disediakan untuk menjaga, merawat, serta memulihkan arsip agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan layak digunakan. Ruang ini berfungsi untuk memastikan arsip tersimpan dalam lingkungan yang terkontrol, mencakup

pengaturan suhu, kelembapan, pencahayaan, serta kebersihan agar arsip terhindar dari kerusakan fisik, jamur, debu, dan hama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaannya baru akan dimulai karena terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta ruang dan prasarana pendukung. Untuk saat ini belum tersedia fasilitas yang memadai, sehingga kami hanya dapat mengoptimalkan sarana yang ada.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum tersedia fasilitas tersebut karena adanya keterbatasan prasarana yang dimiliki saat ini. Kondisi prasarana yang masih terbatas tersebut menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan memerlukan penyesuaian lebih lanjut.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“BPS HSU telah memiliki ruang khusus untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip. Namun, ruang penyimpanan arsip yang tersedia saat ini masih belum memadai karena kapasitasnya yang terbatas”. (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini, belum tersedia ruang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan arsip belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga pengaturan dan penyimpanan arsip masih terbatas pada ruang yang bersifat multifungsi.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Statisi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Karena keterbatasan bangunan, saat ini belum tersedia ruang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Ruang untuk kegiatan tersebut memang tersedia, namun kapasitasnya terbatas karena ukuran ruangan yang relatif kecil. Hal ini membatasi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyimpanan arsip secara optimal.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk arsip keuangan, ruang penyimpanannya sudah tersedia. Namun, ruang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip secara umum masih belum ada.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Statisi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini tidak tersedia ruang untuk kegiatan tersebut karena keterbatasan luas dan kapasitas ruangan yang ada.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat ruang khusus untuk kegiatan tersebut karena luas dan kapasitas ruangan yang terbatas.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip belum memiliki ruang khusus, akibat keterbatasan fasilitas yang tersedia saat ini.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip masih belum memiliki ruang khusus, sehingga pengelolaan arsip saat ini menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi ruang yang ada.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ruang untuk penempatan arsip tersedia, namun untuk ruang khusus pemeliharaan dan perawatan arsip belum tersedia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan

Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tersedia ruang khusus untuk pemeliharaan dan perawatan arsip.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum tersedianya ruang khusus, keterbatasan prasarana, serta kapasitas ruang yang sempit. Meskipun terdapat beberapa ruang yang dimanfaatkan untuk penyimpanan arsip, ruang tersebut belum dirancang khusus untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip, sehingga pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan arsip belum berjalan dengan baik. Tidak adanya ruang khusus menyebabkan kegiatan pemeliharaan arsip tidak dilakukan secara rutin dan terencana. Selain itu, keterbatasan ruang dan fasilitas pendukung mengakibatkan arsip belum terawat secara optimal. Akibatnya, kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip belum mampu mendukung pengelolaan arsip secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip

di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa belum tersedia ruang khusus untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip karena keterbatasan sumber daya manusia, ruang, dan prasarana pendukung. Meskipun terdapat beberapa ruang yang dimanfaatkan, kapasitasnya terbatas dan belum dirancang khusus untuk kegiatan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan arsip belum dapat dilakukan secara optimal dan masih menyesuaikan dengan kondisi serta fasilitas yang ada.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Gedung arsip harus memenuhi standar-minimal gedung arsip yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun isi informasinya. Ruang tersebut minimal terdiri dari ruang Kerja pegawai, ruang pengelola arsip, ruang simpan arsip, ruang pemeliharaan dan perawatan arsip serta ruang layanan arsip.

3. Sistem Kearsipan

Sistem kearsipan dalam UU No. 43 Tahun 2009 disebut sebagai sistem kearsipan nasional (SKN) merupakan suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling memengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.

a. Penciptaan Arsip

Penciptaan arsip adalah proses awal terbentuknya arsip sebagai hasil dari kegiatan atau transaksi organisasi. Tahap ini mencakup pembuatan, penerimaan, dan pengesahan dokumen yang menjadi bukti resmi pelaksanaan tugas. Arsip yang diciptakan harus autentik, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan kearsipan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sudah tersedia sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif melalui penggunaan aplikasi SEKAR untuk pengelolaan dan penataan arsip, serta aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip secara elektronik. Namun, untuk arsip fisik (hardcopy), pemilahan antara arsip aktif dan arsip inaktif masih belum dilakukan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sistem tersebut sudah diterapkan, namun belum berjalan secara maksimal karena masih dalam tahap pembelajaran. Untuk penataannya, arsip aktif disimpan di ruangan, sedangkan arsip inaktif ditempatkan di gudang.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Proses penciptaan arsip di Badan Pusat Statistik telah menggunakan sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif berdasarkan pedoman resmi. Namun, meskipun klasifikasi telah tersedia, penataan ruang arsip belum sepenuhnya terorganisir sehingga proses pencarian arsip terkadang masih belum optimal.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara detail, namun kemungkinan pegawai di Subbagian Umum yang mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Arsip inaktif telah disimpan dalam box, sedangkan arsip aktif masih ditempatkan dalam map agar lebih mudah untuk diakses saat diperlukan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“sudah ada sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sudah tersedia sistem klasifikasi. Arsip inaktif biasanya pada awal tahun dimasukkan ke dalam box dan disimpan secara terpisah berdasarkan tahunnya. Sementara arsip aktif tetap disimpan di rak karena masih diperlukan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sudah ada sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif, yang diterapkan untuk mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian arsip sesuai dengan statusnya.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara detail karena pengelolaan arsip bukan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sistem tersebut seharusnya sudah tersedia, namun saya tidak mengetahui secara pasti mengenai penerapannya karna bukan tugas dan tanggung jawab saya.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelatihan mengenai hal ini sudah pernah dilaksanakan, tetapi penerapannya masih belum sepenuhnya efektif dan memerlukan pembenahan.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran

di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sudah tersedia sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif disimpan di ruangan lantai atas, sedangkan arsip inaktif ditempatkan di lantai bawah.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sepertinya sistem klasifikasi sudah ada, namun saya tidak mengetahui secara pasti detail penerapannya.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penciptaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari telah tersedianya sistem klasifikasi yang membedakan antara arsip aktif dan arsip inaktif, baik melalui penggunaan aplikasi SEKAR dan SRIKANDI maupun melalui pengelompokan arsip secara fisik. Arsip aktif disimpan di ruang kerja atau rak agar mudah diakses, sedangkan arsip inaktif disimpan dalam box dan ditempatkan secara terpisah. Dengan adanya sistem tersebut, penciptaan dan pengelolaan arsip telah memiliki pedoman yang jelas.

Namun, penciptaan arsip belum sepenuhnya berjalan optimal karena pemilahan arsip fisik belum dilakukan secara menyeluruh dan penataan ruang arsip masih belum tertib. Selain

itu, tidak semua pegawai memahami penerapan sistem klasifikasi arsip karena keterbatasan sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penataan arsip fisik masih kurang rapi, sehingga proses pencarian arsip terkadang belum efisien. Akibatnya, efektivitas penciptaan arsip masih dikategorikan cukup efektif, namun memerlukan pembenahan agar dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penciptaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup efektif. Sistem klasifikasi arsip aktif dan arsip inaktif sudah tersedia dan diterapkan, baik secara elektronik maupun fisik. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena pemilahan arsip fisik dan penataan ruang arsip belum tertib serta pemahaman pegawai belum merata.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang mengutip UU no 43 tahun 2009, pasal 40 yang berbunyi Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

b. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip

Arsip digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, penyusunan laporan, perencanaan, evaluasi kegiatan, serta memenuhi kebutuhan hukum atau administratif. Selama digunakan, arsip harus tetap dijaga keasliannya, tidak boleh

diubah, dan penggunaannya harus sesuai prosedur agar tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemeliharaan arsip menjadi hal penting untuk memastikan arsip tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Selama ini, setiap peminjaman arsip hanya dicatat secara sederhana dengan mencantumkan nama peminjam dan dikonfirmasi melalui Subbagian Umum. Namun, hingga saat ini, pencatatan peminjaman secara resmi belum diterapkan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pencatatan peminjaman arsip sebenarnya tidak dilakukan, hanya dilakukan konfirmasi saja, karena peminjam biasanya terbatas pada pihak keuangan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Produser penggunaan arsip belum melakukan pencatatan peminjaman atau penggunaan arsip secara resmi, kecuali untuk peminjaman arsip yang terkait dengan pemeriksaan audit. Peminjaman arsip lainnya dilakukan secara informal dengan ketentuan bahwa arsip yang dipinjam harus dikembalikan pada hari yang sama tanpa melewati batas waktu yang ditentukan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Peminjaman arsip selalu dicatat, dan setiap permintaan peminjaman dikonfirmasi kepada pemegang arsip yang bersangkutan.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini peminjaman arsip belum dicatat secara resmi dan hanya dilakukan melalui konfirmasi ke Subbagian Umum.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat pencatatan peminjaman arsip secara resmi. Apabila ingin meminjam atau membutuhkan arsip, dapat langsung mengambilnya dengan melakukan konfirmasi kepada Subbagian Umum..” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini pencatatan arsip belum dilakukan, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya arsiparis.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini, peminjaman arsip belum dilakukan dengan pencatatan resmi. Setiap pihak yang membutuhkan arsip dapat

mengambilnya secara langsung tanpa prosedur administratif.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, peminjaman arsip tidak dicatat secara resmi; yang diperlukan hanyalah melakukan konfirmasi kepada Subbagian Umum.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya pribadi belum pernah melakukan peminjaman arsip dan tidak terlibat dalam pengelolaan arsip secara langsung, sehingga saya tidak mengetahui prosedur peminjaman yang berlaku.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Peminjaman arsip belum dicatat secara resmi dan hanya melalui konfirmasi ke Subbagian Umum.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, setiap peminjaman arsip dicatat secara resmi. Prosedurnya biasanya melalui surat permohonan yang kemudian diserahkan kepada Kepala Kasubag Umum.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Peminjaman arsip saat ini belum dicatat secara resmi; prosedurnya hanya melalui konfirmasi kepada Subbagian Umum.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peminjaman arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa peminjaman arsip belum dicatat secara resmi dan hanya dilakukan melalui konfirmasi kepada Subbagian Umum atau pemegang arsip. Pencatatan peminjaman umumnya bersifat sederhana, bahkan dalam banyak kasus tidak dilakukan sama sekali, sehingga prosedur peminjaman arsip belum berjalan secara tertib dan terstandar.

Namun, peminjaman arsip belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur kearsipan karena tidak adanya sistem pencatatan yang baku dan keterbatasan sumber daya, seperti belum tersedianya arsiparis. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa arsip dapat dipinjam secara langsung tanpa administrasi yang jelas, baik terkait waktu peminjaman maupun pengembalian arsip. Akibatnya, pengawasan terhadap penggunaan arsip menjadi lemah dan efektivitas peminjaman arsip tergolong kurang efektif, karena berpotensi menimbulkan

risiko kehilangan, keterlambatan pengembalian, serta ketidaktertiban pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peminjaman arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Peminjaman arsip belum dicatat secara resmi dan hanya dilakukan melalui konfirmasi, sehingga prosedur peminjaman belum tertib dan pengawasan penggunaan arsip belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kegiatan perapian arsip selalu dilakukan secara rutin. Arsip dimasukkan ke dalam box khusus dengan pengaturan suhu yang terkontrol, serta dijaga kebersihannya agar terhindar dari gangguan binatang. Setiap tahunnya, kegiatan perapian ini dilaksanakan sebanyak dua hingga tiga kali oleh Subbagian Umum..” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini, penerapan kegiatan pemeliharaan arsip belum berjalan secara rutin dan masih dalam tahap pembelajaran. Rencananya, kegiatan pemeliharaan arsip ini akan diterapkan secara rutin mulai tahun 2026. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapannya saat ini belum optimal.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan arsip di Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan fasilitas. Arsip yang sudah tidak aktif disimpan di lantai bawah dengan kondisi yang kurang mendukung pemeliharaan secara kontinu. Oleh karena itu, perawatan arsip hanya dilakukan secara periodik, misalnya melalui pengecekan tahunan dan penyemprotan obat anti hama.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, pemeliharaan arsip secara rutin belum dilakukan. Namun, penyimpanan arsip dijaga agar tetap aman dari kerusakan.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum ada pemeliharaan arsip yang dilakukan secara resmi. Saat ini, hanya dilakukan pembersihan, namun belum maksimal, sehingga terdapat kemungkinan ditemukannya arsip yang mengalami kerusakan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan arsip saat ini belum dilakukan secara rutin. Kegiatan hanya dilakukan sesekali, sehingga belum teratur dan kemungkinan ada arsip yang mengalami kerusakan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, tempat penyimpanan arsip relatif aman. Namun, untuk arsip koersioner, ada beberapa yang rusak akibat

dimakan rayap. Pengecekan dan pemeliharaan arsip secara menyeluruh jarang dilakukan karena tidak ada petugas arsip khusus.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, pengecekan arsip biasanya dilakukan takutnya terjadi kerusakan, misalnya dimakan tikus atau terkena air.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui hal ini karena arsip bukan tanggung jawab saya.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, kegiatan kearsipan yang pernah dilakukan hanya terbatas pada pemusnahan arsip. Sedangkan mengenai pemeliharaan arsip, saya tidak mengetahuinya.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan arsip belum dilakukan secara rutin karena pengecekan dilakukan hanya sesekali.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran

di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan arsip sudah dilakukan secara rutin, namun terkadang masih ditemukan arsip yang mengalami kerusakan, misalnya dimakan rayap atau sebab lainnya.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kegiatan pemeliharaan arsip biasanya dilakukan satu kali dalam setahun untuk mencegah kerusakan pada arsip.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Beberapa informan menyampaikan bahwa perapian dan pemeliharaan arsip sudah dilakukan, seperti penyimpanan arsip dalam box, pengaturan kebersihan, serta pengecekan berkala satu hingga tiga kali dalam setahun. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi arsip agar tetap aman dari kerusakan.

Namun demikian, pemeliharaan arsip belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Kegiatan pemeliharaan masih bersifat sesekali, tergantung waktu dan kondisi, serta terkendala keterbatasan fasilitas dan tidak adanya petugas arsip khusus. Akibatnya, masih ditemukan arsip yang rusak, seperti dimakan rayap atau kurang terawat.

Berdasarkan hasil observasi, kondisi pemeliharaan arsip juga menunjukkan bahwa pengecekan arsip tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Arsip yang disimpan di ruang atau lantai bawah memiliki kondisi penyimpanan yang kurang mendukung pemeliharaan jangka panjang. Kegiatan pemeliharaan lebih bersifat pembersihan sederhana dan belum disertai prosedur pemeliharaan arsip yang baku. Oleh karena itu, pemeliharaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemeliharaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Hal ini karena kegiatan pemeliharaan arsip belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, masih bersifat sesekali atau periodik, serta terkendala keterbatasan fasilitas dan tidak adanya petugas arsip khusus. Akibatnya, masih ditemukan arsip yang rusak, seperti dimakan rayap atau kurang terawat, sehingga pemeliharaan arsip belum berjalan optimal.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang mengutip UU no 43 tahun 2009, pasal 45 ayat (2) yang berbunyi Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.

c. Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi jumlah arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna,

sesuai dengan ketentuan jadwal retensi arsip. Proses ini meliputi pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna sekunder, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan dilakukan untuk memastikan bahwa arsip yang disimpan hanya arsip yang bernilai dan relevan, sehingga efisiensi ruang, kemudahan temu kembali, serta pengelolaan arsip dapat berjalan secara efektif dan tertib sesuai prinsip kearsipan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kegiatan perapian arsip selalu dilakukan secara rutin. Arsip dimasukkan ke dalam box khusus dengan pengaturan suhu yang terkontrol, serta dijaga kebersihannya agar terhindar dari gangguan binatang. Setiap tahunnya, kegiatan perapian ini dilaksanakan sebanyak dua hingga tiga kali oleh Subbagian Umum.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan masih belum optimal karena belum tersedia petugas khusus yang bertanggung jawab melakukan pengecekan arsip. Saat ini, kami masih dalam tahap pembelajaran dan penyesuaian terkait proses tersebut.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan

Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dilakukan secara rutin pada tingkat kabupaten, melainkan mengikuti arahan yang ditetapkan oleh pusat. Retensi arsip ditentukan terlebih dahulu, dan setelah masa retensi berakhir barulah diajukan usulan penghapusan. Dengan demikian, penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan arahan dari pusat.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Biasanya, begitu jadwal penyusutan ditetapkan, kegiatan penyusutan arsip langsung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”(Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan sebelumnya dikoordinasikan oleh BPS Provinsi.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui secara pasti karena saya juga baru bergabung di sini.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Proses penyusutan arsip dimulai dengan menunggu arahan dari BPS Provinsi. Kasubag Umum mengeluarkan surat permintaan yang memuat arsip mana saja yang harus disiapkan. Seluruh arsip yang diminta kemudian dikumpulkan di satu tempat dan didokumentasikan melalui foto. Setelah itu, berkas diajukan ke BPS Provinsi, kemudian diteruskan ke pusat dan ke ANRI. Pemusnahan arsip baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“saat ini berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan arsip biasanya mengikuti instruksi langsung yang diterbitkan oleh BPS Provinsi maupun BPS Pusat.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan arsip dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan belum adanya petugas arsip khusus dan keterbatasan ruang penyimpanan. Secara keseluruhan, pelaksanaannya dapat dikatakan sekitar 70% efektif.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan arsip dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Kegiatan ini baru mulai dilaksanakan pada tahun ini; pada tiga tahun sebelumnya (tahun pertama hingga ketiga) kegiatan penyusutan arsip belum dilakukan.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kantor pusat.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip dapat dikatakan cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, prosedur yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku..”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Kegiatan penyusutan arsip telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dan ketentuan dari BPS Pusat dan BPS Provinsi, mulai dari penentuan masa retensi hingga pengajuan pemusnahan arsip

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan dan prosedur, penyusutan arsip telah diterapkan dengan baik.

Namun, berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip belum sepenuhnya optimal. Kegiatan penyusutan belum dilakukan secara rutin dan masih bergantung pada instruksi dari pusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya petugas arsip khusus, serta keterbatasan ruang penyimpanan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Akibatnya, meskipun telah berjalan sesuai prosedur, efektivitas penyusutan arsip masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan penyusutan arsip telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dan ketentuan dari BPS Pusat dan BPS Provinsi, mulai dari penetapan masa retensi hingga proses pengajuan pemusnahan arsip berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang mengutip UU no 43 tahun 2009, pasal 1 ayat (23) yang berbunyi Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif

dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

4. Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan ditetapkan melalui berbagai produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Produk hukum tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan Kepala ANRI, dan keputusan pimpinan organisasi penyelenggara kearsipan. Kebijakan tersebut dapat berupa pedoman berbagai bidang atau tahapan kegiatan kearsipan.

a. Pedoman Kearsipan

Pedoman kearsipan merupakan ketentuan atau acuan yang digunakan untuk mengatur pengelolaan arsip secara sistematis dan tertib, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan arsip dikelola secara efisien, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isi pedoman kearsipan biasanya mencakup prosedur klasifikasi arsip, penentuan jadwal retensi arsip, tata cara penyimpanan dan pemeliharaan, mekanisme peminjaman dan penggunaan arsip, hingga prosedur pemusnahan atau penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Dengan adanya pedoman kearsipan, organisasi dapat menjaga keberlanjutan informasi, mempermudah temu kembali dokumen,

serta memenuhi standar hukum dan administrasi yang berlaku dalam pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pedoman dan kebijakan resmi dari pusat sudah tersedia; namun, dalam pelaksanaannya, terkadang tidak berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana yang tersedia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pedoman dan kebijakan resmi terkait pengelolaan serta penyusutan arsip telah ditetapkan langsung oleh pusat, mengingat kami merupakan instansi vertikal. Saat ini, pengelolaan dan penyusutan arsip telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan kebijakan tersebut.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara belum memiliki pedoman atau SOP resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, pengelolaan arsip telah mengikuti pedoman dan SOP resmi yang dikeluarkan oleh BPS pusat.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, pedoman dan kebijakan resmi terkait pengelolaan dan penyusutan arsip sudah ada.”(Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasis Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara pasti, namun kemungkinan kebijakan dan pedomannya sudah ada. Hanya saja, karena tidak ada pelatihan khusus, pedoman tersebut menjadi kurang tersosialisasi.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Ya, kami mengikuti pedoman dan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh pusat.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kebijakan dan pedoman telah ditetapkan oleh pusat, sehingga pengelolaan dan penyusutan arsip di BPS HSU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ada, dan sejauh ini kami mengikuti pedoman atau kebijakan resmi yang telah ditetapkan.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, pedoman dan kebijakan dari pusat sudah ada, dan kami telah mengikuti ketentuan tersebut. Namun, terdapat beberapa aspek, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana, yang menyebabkan pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal seratus persen.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk kebijakan dan pedoman resmi, saya yakin keduanya sudah ada, mengingat kami adalah instansi vertikal sehingga seluruh aturan tersebut pasti ditetapkan oleh pusat. Namun, terkait penerapannya di kantor ini, saya kurang mengetahui secara pasti. Sejauh yang saya amati, penerapannya tampaknya masih belum maksimal.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, kami memiliki pedoman dan kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pusat.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Instansi ini memiliki pedoman atau kebijakan resmi terkait pengelolaan dan penyusutan arsip yang dikeluarkan oleh provinsi dan diperkuat oleh kebijakan dari pusat.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ya, pedoman dan kebijakan resmi terkait pengelolaan serta penyusutan arsip ada, dan saat ini pengelolaannya telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pusat.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pedoman dan kebijakan pengelolaan serta penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedoman dan kebijakan resmi telah tersedia dan ditetapkan oleh BPS Pusat sebagai instansi vertikal, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyusutan arsip di tingkat kabupaten.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan beberapa pernyataan informan, penerapan pedoman tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya pelatihan khusus, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Akibatnya, meskipun pedoman sudah ada dan digunakan, pelaksanaannya masih belum maksimal di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, efektivitas pedoman dan kebijakan kearsipan dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi masih memerlukan perbaikan agar berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pedoman dan kebijakan pengelolaan serta penyusutan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Pedoman dan kebijakan resmi telah tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. Namun, penerapannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, meskipun telah dilaksanakan sesuai ketentuan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Kebijakan kearsipan ditetapkan melalui berbagai produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

b. Pelaksanaan Jadwal Retensi Aktif

Pelaksanaan jadwal retensi arsip aktif adalah pengelolaan arsip yang masih sering digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Arsip dicatat, diklasifikasikan, dan disimpan di lokasi yang mudah diakses. Jadwal retensi menentukan berapa lama arsip tetap aktif sebelum dialihkan menjadi arsip inaktif atau disusun kembali. Pelaksanaan yang tepat memastikan arsip tersedia saat dibutuhkan, aman, dan mudah ditemukan, serta sesuai ketentuan kearsipan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Penerapan jadwal retensi arsip belum dilakukan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan arsiparis khusus yang menangani kearsipan, seperti halnya di tingkat provinsi.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saat ini, penerapan jadwal retensi arsip belum kompeten. Namun, rencana implementasi telah dijadwalkan pada tahun 2026, dan mulai Februari 2026, seluruh BPS di Kalimantan Selatan akan memulai penerapan tersebut.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Jadwal retensi arsip di BPS Hulu Sungai Utara telah diterapkan. Namun, pelaksanaannya belum konsisten karena masih menyesuaikan dengan kebijakan dan penjadwalan dari pusat terkait masa simpan serta penghapusan arsip.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jadwal retensi arsip di BPS Hulu Sungai Utara sudah sesuai dengan ketentuan, karena selalu mengikuti arahan langsung dari pusat.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jadwal retensi arsip belum konsisten, karena baru akan diterapkan dan dilaksanakan mulai tahun depan.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Jadwal retensi arsip di BPS Hulu Sungai Utara telah diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan arsip.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kami telah konsisten mengikuti arahan dari pusat dalam pelaksanaan jadwal retensi arsip.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kami konsisten melaksanakan retensi arsip sesuai dengan arahan dari provinsi.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara memiliki jadwal retensi arsip dan secara konsisten menerapkannya dalam pengelolaan arsip.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui secara pasti, namun kemungkinan penerapan belum konsisten jika dilihat dari kondisi di lapangan.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara rinci karena hal tersebut menjadi tugas Subbagian Umum. Namun, sejauh saya, tahun ini telah dilaksanakan retensi arsip, dan setiap tahunnya terdapat pengusulan terkait pengelolaan arsip.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan jadwal retensi arsip telah diterapkan sesuai dengan arahan pusat.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan arsip dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan atau arahan.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan jadwal retensi arsip di Badan Pusat Statistik

Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Jadwal retensi arsip sudah tersedia dan pada dasarnya dilaksanakan dengan mengikuti arahan dari BPS pusat dan provinsi. Beberapa pegawai menyampaikan bahwa retensi arsip telah diterapkan dan dilakukan setiap tahun melalui pengusulan pengelolaan arsip. Namun, penerapannya belum berjalan secara konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya arsiparis khusus, serta masih menunggu penyesuaian kebijakan dan jadwal dari pusat.

Berdasarkan hasil observasi, penerapan jadwal retensi arsip belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan retensi arsip masih bergantung pada arahan dari pusat dan belum dilakukan secara mandiri dan rutin di tingkat kabupaten. Selain itu, kurangnya petugas khusus kearsipan menyebabkan pelaksanaan retensi arsip belum merata. Akibatnya, meskipun jadwal retensi arsip sudah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih konsisten dan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan jadwal retensi arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Jadwal retensi arsip sudah tersedia dan telah dilaksanakan dengan mengacu pada arahan dari BPS pusat dan provinsi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya arsiparis khusus, serta masih bergantung pada kebijakan dan penjadwalan

dari pusat. Akibatnya, meskipun telah diterapkan, efektivitas penerapan jadwal retensi arsip masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang mengutip UU no 43 tahun 2009, pasal 48 ayat (2) yang berbunyi JRA sebagaimana ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD.

5. Dana/Anggaran

Dana/anggaran merupakan modal untuk pengadaan berbagai kebutuhan baik barang maupun jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan, Kebutuhan tersebut seperti prasarana dan sarana kearsipan, sistem kearsipan, kebijakan kearsipan, dan SDM.

a. Anggaran Kearsipan

Dana atau anggaran kearsipan adalah alokasi sumber daya keuangan yang disediakan oleh organisasi untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan arsip. Anggaran ini mencakup pembiayaan untuk penciptaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Selain itu, dana kearsipan juga digunakan untuk pengadaan fasilitas fisik seperti rak, lemari arsip, ruang khusus pemeliharaan arsip, serta perlengkapan digital untuk arsip elektronik. Pelaksanaan anggaran kearsipan yang tepat dan efisien memastikan bahwa seluruh arsip dapat dikelola secara optimal, tersedia saat

dibutuhkan, dan terjaga keasliannya sesuai ketentuan kearsipan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Tidak terdapat anggaran khusus untuk kearsipan. Kegiatan kearsipan dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran operasional perkantoran yang ada secara maksimal.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Tidak terdapat anggaran khusus untuk kearsipan, kegiatan kearsipan dibiayai melalui anggaran operasional perkantoran yang tersedia.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran khusus untuk kegiatan kearsipan belum tersedia secara mandiri. Namun, BPS HSU memberikan dukungan yang cukup terhadap kegiatan kearsipan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti rak, lemari arsip, serta perlengkapan penyimpanan lainnya. Selama ini, alokasi anggaran untuk kebutuhan kearsipan bersumber dari anggaran administrasi.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, tidak terdapat anggaran yang khusus dialokasikan untuk kegiatan kearsipan.”(Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Statisi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya, tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan kearsipan. Namun, anggaran dari APBN terkadang digunakan untuk pengadaan sarana penyimpanan arsip, seperti box arsip.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Meskipun tidak terdapat anggaran khusus untuk kearsipan, kami memanfaatkan anggaran APBN yang tersedia dan mengalokasikannya secara optimal untuk kegiatan kearsipan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui, tidak terdapat anggaran khusus untuk kearsipan; kegiatan kearsipan biasanya dibiayai menggunakan anggaran administrasi.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Statisi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan anggaran kearsipan dilakukan secara efisien dan sesuai aturan yang berlaku, meskipun tidak terdapat anggaran khusus. Kegiatan kearsipan dibiayai melalui anggaran administrasi yang ada.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran khusus untuk kearsipan tidak tersedia. Namun, apabila terdapat sisa anggaran di akhir tahun, dana tersebut dapat dioptimalkan untuk pengadaan perlengkapan penyimpanan arsip, seperti box arsip.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysa Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran untuk kearsipan relatif kecil dan tidak menjadi prioritas utama. Dalam satu tahun, alokasi untuk kegiatan kearsipan hanya mencakup beberapa persen dari keseluruhan anggaran.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Tidak terdapat anggaran khusus untuk kearsipan. Kebutuhan terkait pembelian perlengkapan atau bahan kearsipan biasanya dibiayai melalui anggaran administrasi.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk mendukung kegiatan kearsipan, meskipun tidak terdapat anggaran khusus.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan

Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan anggaran kearsipan berjalan baik dan telah sesuai dengan kebutuhan yang ada.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat anggaran khusus yang dialokasikan secara mandiri untuk kegiatan kearsipan, pelaksanaan kearsipan tetap berjalan dengan memanfaatkan anggaran operasional atau administrasi perkantoran yang tersedia. Dukungan anggaran juga terlihat dari pemanfaatan anggaran APBN serta sisa anggaran akhir tahun untuk pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, seperti box arsip, rak, dan lemari arsip.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa dukungan anggaran khusus. Hal ini terlihat dari ketersediaan sarana penyimpanan arsip yang digunakan dalam menunjang aktivitas kearsipan sehari-hari. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya memadai, serta belum didukung oleh perencanaan anggaran kearsipan yang terpisah dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran kearsipan di Badan

Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif, karena mampu mendukung keberlangsungan kegiatan kearsipan secara efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan ketiadaan anggaran khusus menyebabkan kegiatan kearsipan belum dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran kearsipan ke depan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Dana/anggaran merupakan modal untuk pengadaan berbagai kebutuhan baik barang maupun jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Kebutuhan tersebut seperti prasarana dan sarana kearsipan, sistem kearsipan, kebijakan kearsipan, dan SDM.

b. Pemanfaatan Dana Kearsipan

Pemanfaatan dana kearsipan adalah penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pengelolaan arsip agar berjalan efektif dan efisien. Dana ini dimanfaatkan untuk memastikan arsip dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Pemanfaatannya meliputi pembelian perlengkapan dan fasilitas pendukung, seperti rak, lemari arsip, kotak arsip, ruang penyimpanan khusus dengan kondisi yang terkontrol, serta perangkat lunak atau sistem untuk pengelolaan arsip digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran operasional perkantoran selalu kami optimalkan untuk keperluan pengadaan rak dan kotak arsip. Saat ini, alokasi anggaran tersebut dianggap sudah memadai sesuai dengan kebutuhan, meskipun keterbatasan ruang penyimpanan masih menjadi kendala.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan sebaik-baiknya, antara lain untuk pengadaan rak, dan saat ini dianggap telah sesuai dengan kebutuhan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Stasi Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal, di mana seluruh alokasi anggaran telah direalisasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, seperti lemari dan rak arsip.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan anggaran dilakukan secara maksimal dan disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila diperlukan, misalnya untuk pengadaan lemari atau penambahan rak guna memenuhi kekurangan sarana arsip, anggaran tersebut dapat dicairkan untuk pengadaan.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan dengan baik untuk pengadaan perlengkapan dan sarana pendukung. Namun, keterbatasan dan kondisi ruang penyimpanan yang sempit menjadi kendala dalam pengelolaan arsip.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengadaan rak, kotak, dan folder arsip telah dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, karena keterbatasan ruang penyimpanan, pengelolaan arsip masih memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Alokasi anggaran memadai, khususnya untuk pengadaan rak dan kotak arsip.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“anggaran yang tersedia sudah sesuai dan dimanfaatkan dengan baik. Apabila terjadi kerusakan pada sarana atau prasarana, hal tersebut segera diperbaiki.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan lemari dan rak arsip dilakukan secara rutin, di mana barang yang rusak segera diganti. Dengan demikian, pemanfaatan sarana penyimpanan arsip dapat dikatakan baik.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara maksimal, karena setiap kekurangan sarana atau prasarana langsung diatasi dengan pengadaan tambahan.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran telah dimanfaatkan dengan baik. Apabila diperlukan tambahan sarana seperti lemari atau rak arsip, pengadaan dapat segera dilakukan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran telah dimanfaatkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran kearsipan cukup efektif. Seluruh informan menyatakan bahwa anggaran operasional perkantoran yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan kearsipan, khususnya dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana penyimpanan arsip seperti rak, lemari arsip, kotak arsip, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Apabila terjadi kekurangan, kerusakan, atau kebutuhan tambahan terhadap sarana dan prasarana kearsipan, pengadaan dapat segera dilakukan melalui anggaran yang tersedia. Selain itu, pemeliharaan sarana penyimpanan arsip dilaksanakan secara rutin, sehingga kondisi sarana kearsipan tetap terjaga dan dapat digunakan secara optimal.

Namun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang penyimpanan arsip masih menjadi kendala dalam pengelolaan kearsipan. Kendala tersebut bukan disebabkan oleh ketidakcukupan anggaran, melainkan oleh

keterbatasan ruang fisik yang tersedia, sehingga pemanfaatan sarana kearsipan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun kegiatan kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik, keterbatasan ruang penyimpanan arsip dan belum adanya perencanaan anggaran kearsipan secara khusus menyebabkan pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun pemanfaatan anggaran telah mendukung keberlangsungan kegiatan kearsipan, peningkatan efektivitas masih diperlukan melalui perencanaan anggaran yang lebih terstruktur dan penyediaan ruang penyimpanan arsip yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan kebutuhan dan SOP yang berlaku, serta mampu mendukung pengadaan dan pemeliharaan sarana kearsipan. Sementara itu, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun kegiatan kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik, keterbatasan ruang penyimpanan arsip dan belum adanya perencanaan anggaran kearsipan secara khusus menyebabkan pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun pemanfaatan anggaran telah mendukung keberlangsungan

kegiatan kearsipan, peningkatan efektivitas masih diperlukan melalui perencanaan anggaran yang lebih terstruktur dan penyediaan ruang penyimpanan arsip yang memadai.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Dana/anggaran merupakan modal untuk pengadaan berbagai kebutuhan baik barang maupun jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Kebutuhan tersebut seperti prasarana dan sarana kearsipan, sistem kearsipan, kebijakan kearsipan, dan SDM.

6. Sosialisasi dan Apresiasi Kearsipan

Sosialisasi dan apresiasi kearsipan turut menentukan dan memengaruhi penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi SDM kearsipan maupun masyarakat umum yang bagus terhadap arsip dan kearsipan sangat membantu pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap arsip dan kearsipan akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi yang baik akan mendorong partisipasi aktif SDM kearsipan dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan kearsipan.

a. Pemahaman

Sejauh mana SDM mampu menangkap, mengerti, dan menginternalisasi informasi yang disampaikan terkait pengelolaan arsip. Pemahaman yang baik ditunjukkan melalui kemampuan mereka memahami pentingnya arsip, mengenali prosedur kearsipan yang benar, serta menerapkan pengetahuan

tersebut dalam praktik pengelolaan arsip. Tingkat pemahaman yang memadai memastikan bahwa pesan sosialisasi benar-benar tersampaikan dan dipraktikkan, sehingga mendukung penyelenggaraan kearsipan yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kami selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada saat rapat. Dalam setiap rapat, kami selaku pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kembali mengenai pentingnya pengelolaan arsip. Kami selalu menyampaikan agar arsip disimpan dengan rapi. Untuk kegiatan sosialisasi khusus terkait kearsipan memang ada, namun biasanya hanya diikuti oleh pegawai dari Subbagian Umum dan Teknis yang ditugaskan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Hal tersebut biasanya dilakukan pada saat rapat. Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, kami umumnya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta yang hadir biasanya adalah pegawai yang terlibat dalam bidang administrasi. Sementara itu, untuk seluruh pegawai, kegiatan yang dilakukan lebih bersifat internalisasi di lingkungan kantor.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Sosialisasi lebih diprioritaskan kepada ketua tim, pengelola anggaran, dan pegawai bagian keuangan. Sedangkan untuk seluruh pegawai, sosialisasi biasanya bersifat pemberitahuan dan disampaikan secara umum dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan keuangan.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Statisi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Biasanya, masalah kearsipan hanya sesekali diselipkan dalam rapat. Untuk sosialisasi yang bersifat khusus terkait kearsipan, belum dilakukan di bps hsu” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Statisi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi khusus mengenai kearsipan, belum dilakukan. Namun, untuk sosialisasi terkait administrasi, kegiatan tersebut ada dan dilaksanakan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatkan bahwa:

“Untuk sosialisasi mengenai pentingnya arsip kepada seluruh pegawai, kegiatan tersebut belum dilaksanakan.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk seluruh pegawai, sosialisasi belum dilakukan. Sosialisasi baru diberikan kepada ketua tim, sehingga belum bersifat menyeluruh.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum ada sosialisasi khusus mengenai kearsipan. Namun, dalam rapat, isu kearsipan sering disinggung dan disampaikan kepada seluruh pegawai.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pernah ada penyampaian mengenai kearsipan dalam rapat, tetapi sosialisasi yang bersifat khusus mengenai kearsipan diselenggarakan di tingkat provinsi. Peserta yang menghadiri kegiatan tersebut biasanya hanya pegawai Subbagian Umum, karena pengelolaan arsip menjadi tanggung jawab mereka.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi mengenai kearsipan kepada seluruh pegawai di kantor ini, belum pernah dilaksanakan. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi pernah diikuti, namun sudah lama, dan pesertanya tidak seluruh pegawai, melainkan hanya beberapa orang.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pernah dilakukan pada saat rapat pegawai. Biasanya, jika sudah ada kegiatan sosialisasi dari provinsi akan dibagikan pada rapat pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memperoleh informasi tersebut.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara detail mengenai hal tersebut karena saya juga tergolong pegawai baru.”
(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Hanya sebagian pegawai yang pernah mengikuti sosialisasi, yaitu mereka yang terlibat langsung dengan pengelolaan arsip.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan kurang efektif. Pimpinan dan pejabat struktural menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip kepada pegawai, terutama melalui rapat-rapat rutin, dengan tujuan mengingatkan agar arsip disimpan dengan rapi dan sesuai ketentuan. Selain itu, sosialisasi kearsipan juga pernah dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti oleh pegawai tertentu, khususnya yang bertugas di Subbagian Umum atau yang terlibat langsung dalam administrasi dan pengelolaan arsip.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi kearsipan belum menjangkau seluruh pegawai secara

merata. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sosialisasi khusus mengenai kearsipan belum pernah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan hanya disampaikan secara singkat atau diselipkan dalam rapat. Sosialisasi yang ada juga lebih diprioritaskan kepada ketua tim, pengelola anggaran, pegawai bagian keuangan, serta pegawai yang menangani administrasi, sehingga pegawai lain hanya menerima informasi secara umum dan terbatas. Akibatnya, pemahaman pegawai terhadap pentingnya pengelolaan arsip dan prosedur kearsipan belum merata.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Sosialisasi belum dilaksanakan secara khusus, terjadwal, dan berkelanjutan, serta lebih banyak bergantung pada penyampaian lisan dalam rapat-rapat internal. Tidak adanya kegiatan sosialisasi kearsipan yang bersifat menyeluruh menyebabkan sebagian pegawai kurang memahami peran arsip sebagai sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban. Kondisi ini berdampak pada belum efektifnya penerapan pengelolaan arsip secara seragam di seluruh unit kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan namun belum berjalan secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

pimpinan dan pejabat struktural telah menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip kepada pegawai, terutama melalui rapat-rapat rutin. Sosialisasi kearsipan juga pernah dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti oleh pegawai tertentu, khususnya pegawai Subbagian Umum dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan kearsipan.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Sosialisasi dan apresiasi kearsipan turut menentukan dan mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi SDM kearsipan maupun masyarakat umum yang bagus terhadap arsip dan kearsipan sangat membantu pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap arsip dan kearsipan akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi yang baik akan mendorong partisipasi aktif SDM kearsipan dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan kearsipan.

b. Apresiasi

Sejauh mana SDM kearsipan menilai, menghargai, dan menunjukkan perhatian terhadap pentingnya arsip dan proses pengelolaannya. Apresiasi yang baik tercermin melalui sikap positif terhadap pengelolaan arsip, kepatuhan pada prosedur kearsipan, dan kesediaan untuk mendukung praktik-praktik

kearsipan yang tertib. Tingkat apresiasi yang tinggi mendorong motivasi untuk menjaga kualitas arsip, meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketersediaan arsip, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Untuk selama ini, kami tetap menyampaikan ucapan terima kasih.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat apresiasi khusus, karena proses perbaikan masih dalam tahap awal.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Staf Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Apresiasi yang diberikan berupa ucapan selamat dari pimpinan kepada tim kerja.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Staf Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat apresiasi khusus untuk kegiatan kearsipan. Namun, bisa juga Subbagian Umum dapat memperoleh apresiasi berupa peningkatan nilai kinerja

pegawai, mengingat mereka yang menangani arsip.”(Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi’unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat apresiasi yang diberikan oleh BPS HSU kepada pegawai.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Tidak ada apresiasi yang diberikan hingga saat ini.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S.Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Hingga saat ini, belum terdapat apresiasi yang diberikan.”(Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Bentuk apresiasi yang diberikan berupa ucapan terima kasih atau penilaian kinerja yang baik.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat apresiasi khusus terkait kegiatan kearsipan.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum terdapat apresiasi; apresiasi di sini tergolong minim.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasis Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Apresiasi yang diberikan bersifat secukupnya, misalnya berupa peningkatan nilai kinerja oleh Bapak Kepala.”(Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Saya kurang mengetahui secara detail mengenai hal tersebut karena saya juga tergolong pegawai baru.”(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Hanya sebagian pegawai yang pernah mengikuti sosialisasi, yaitu mereka yang terlibat langsung dengan pengelolaan arsip.”(Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bentuk apresiasi terhadap kegiatan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif.

Pimpinan dan pejabat struktural umumnya menyampaikan ucapan terima kasih atau penilaian kinerja yang baik kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip, namun apresiasi ini belum rutin, formal, atau menyeluruh, sehingga sebagian pegawai belum menerima penghargaan yang memadai dan motivasi terhadap kegiatan kearsipan belum merata.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan apresiasi kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Apresiasi yang ada bersifat sporadis dan simbolis, sehingga belum mampu mendorong seluruh pegawai untuk secara konsisten berpartisipasi dalam pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa apresiasi terhadap kegiatan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Apresiasi yang diberikan sebagian besar berupa ucapan terima kasih atau penilaian kinerja yang baik bagi pegawai yang terlibat langsung, namun belum rutin, formal, maupun menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan sebagian pegawai belum menerima penghargaan yang memadai, sehingga motivasi dan partisipasi seluruh pegawai dalam kegiatan kearsipan belum optimal.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Musliichah (2019:51), yang menyatakan bahwa Sosialisasi dan apresiasi kearsipan turut menentukan dan mempengaruhi

penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi SDM kearsipan maupun masyarakat umum yang bagus terhadap arsip dan kearsipan sangat membantu pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap arsip dan kearsipan akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi yang baik akan mendorong partisipasi aktif SDM kearsipan dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan kearsipan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Pengelolaan Arsip pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan arsip yaitu:

1. Faktor Penghambat

1. Tidak Adanya Pelatihan Khusus di Tingkat Kabupaten

Maksud dari Tidak adanya pelatihan khusus di tingkat kabupaten menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini belum pernah diselenggarakan pelatihan kearsipan yang bersifat khusus, terencana, dan berkelanjutan di lingkungan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rabi'unnisa Dwi Nurdila, A.Md.Stat selaku Stasi Terampil di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Ketiadaan pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten terjadi karena selama ini kegiatan kearsipan dianggap telah terwakili melalui keikutsertaan beberapa pegawai pada sosialisasi di tingkat provinsi. Oleh karena itu, belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan kearsipan secara khusus di lingkungan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum adanya pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten juga dipengaruhi oleh ketiadaan program khusus yang mengatur pelaksanaannya. Kondisi tersebut diperkuat dengan keterbatasan jumlah pegawai yang menangani arsip, sehingga pelatihan lebih banyak bergantung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh provinsi.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghysta Alif Jabir, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum adanya pegawai khusus yang menangani kearsipan menyebabkan pelatihan kearsipan belum menjadi prioritas di tingkat kabupaten. Akibatnya, peningkatan pemahaman kearsipan hanya dilakukan melalui arahan singkat atau sosialisasi yang bersifat terbatas.” (Wawancara, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama belum terselenggaranya pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten. Pengelolaan arsip yang masih dirangkap dengan tugas lain menyebabkan perencanaan pelatihan kearsipan belum dapat dilaksanakan secara terpisah dan terfokus.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fibrina Sriliana, SP selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Belum adanya kebijakan atau program internal yang secara khusus mengatur pelatihan kearsipan menjadi alasan utama tidak dilaksanakannya pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten. Selama ini, peningkatan kompetensi kearsipan pegawai masih mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan di luar kabupaten.” (November, 4 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum pernah diselenggarakan pelatihan kearsipan secara khusus di tingkat kabupaten. Informan menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan pemahaman kearsipan yang ada hanya berupa sosialisasi atau kegiatan serupa yang diselenggarakan di tingkat provinsi dengan peserta terbatas. Tidak adanya pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten disebabkan oleh belum adanya program atau kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum tersedianya pegawai atau arsiparis khusus yang menangani kearsipan, sehingga pelatihan kearsipan belum menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, diketahui bahwa

pengelolaan arsip masih dilaksanakan oleh pegawai Subbagian Umum yang merangkap dengan tugas administrasi lainnya. Tidak ditemukan adanya program, jadwal, maupun dokumentasi pelatihan kearsipan internal di tingkat kabupaten. Selain itu, terlihat adanya perbedaan pemahaman dan praktik pengelolaan arsip antarpegawai, yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi kearsipan belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pelatihan kearsipan di tingkat kabupaten merupakan salah satu faktor penghambat dalam peningkatan efektivitas pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pernyataan para informan mengenai ketiadaan pelatihan kearsipan diperkuat oleh temuan observasi yang menunjukkan belum adanya program pelatihan internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya arsiparis khusus. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kompetensi kearsipan pegawai masih bergantung pada sosialisasi dari tingkat provinsi dan berbagi pengetahuan secara informal, sehingga pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal dan seragam.

b. Fungsi ruang yang tumpang tindih (multifungsi)

Hambatan utama dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah penggunaan ruang yang bersifat multifungsi, di mana ruang kerja, ruang administrasi, atau ruang penyimpanan sementara juga dimanfaatkan sebagai tempat penataan dan penyimpanan arsip.

Kondisi ini menyebabkan fungsi ruang tidak berjalan secara optimal, karena aktivitas kearsipan harus menyesuaikan dengan kepentingan lain di ruangan yang sama. Akibatnya, proses pemeliharaan arsip seperti penataan, penyortiran, dan perawatan arsip tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan sesuai standar kearsipan. Selain itu, tumpang tindih fungsi ruang juga meningkatkan risiko ketidakteraturan, kerusakan arsip, serta keterbatasan akses, sehingga berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta ruang dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan ruang yang ada harus dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan, sehingga ruang yang digunakan untuk arsip juga difungsikan untuk aktivitas lain dan bersifat multifungsi."(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arfiani, S.Si selaku Kepala Subbagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Keterbatasan prasarana yang dimiliki saat ini menghambat pelaksanaan kegiatan kearsipan secara optimal. Akibat belum tersedianya ruang khusus, ruang yang ada digunakan secara bersama untuk beberapa kegiatan, termasuk penyimpanan arsip, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi ruang."(Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Belum tersedia ruang khusus untuk pemeliharaan dan perawatan arsip di karenakan ruangan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengaturan dan penyimpanan arsip masih dilakukan di ruang yang bersifat multifungsi, yang juga digunakan untuk kegiatan kerja lainnya." (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip belum memiliki ruang khusus. Oleh karena itu, pengelolaan arsip menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi ruang yang ada, sehingga ruang yang digunakan memiliki fungsi ganda." (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Meskipun ruang penempatan arsip tersedia, namun belum ada ruang khusus untuk pemeliharaan dan perawatan arsip. Akibatnya, arsip ditempatkan di ruang lain yang juga memiliki fungsi berbeda, sehingga penggunaan ruang menjadi tumpang tindih." (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa belum tersedianya ruang khusus untuk pemeliharaan dan perawatan arsip menyebabkan ruang yang ada harus digunakan secara bersama untuk berbagai aktivitas. Ruang kerja, ruang administrasi, dan ruang penyimpanan arsip tidak terpisah secara jelas, sehingga fungsi ruang menjadi tumpang tindih. Kondisi ini mengharuskan pengelolaan

arsip menyesuaikan dengan penggunaan ruang lain, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa arsip disimpan di ruang yang juga digunakan untuk aktivitas kerja harian. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara ruang kerja dan ruang kearsipan, sehingga ruang tersebut berfungsi ganda. Akibatnya, aktivitas pemeliharaan arsip seperti penataan, pemindahan, dan perawatan arsip sering terhambat oleh aktivitas lain yang berlangsung di ruangan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa fungsi ruang kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih bersifat tumpang tindih akibat keterbatasan ruang dan belum adanya ruang khusus kearsipan. Penggunaan ruang secara multifungsi menyebabkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip tidak dapat dilakukan secara fokus dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan arsip, karena ruang yang seharusnya difungsikan secara khusus untuk kearsipan harus berbagi dengan kegiatan lain.

c. Belum diterapkannya sistem pengelolaan arsip yang terstandar

Belum diterapkannya sistem pengelolaan arsip yang terstandar menjadi hambatan utama dalam penggunaan dan pemeliharaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penggunaan arsip, khususnya peminjaman dan pengembalian,

masih dilakukan secara informal tanpa prosedur baku dan pencatatan resmi, sehingga pengendalian dan penelusuran arsip belum optimal. Selain itu, pemeliharaan arsip belum memiliki pedoman dan jadwal yang jelas, menyebabkan kegiatan perawatan dilakukan secara insidental. Ketiadaan arsiparis atau petugas kearsipan khusus semakin memperlemah pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, dan menurunnya nilai guna arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada kebijakan dan prosedur tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan arsip. Selama ini, penggunaan dan pemeliharaan arsip dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga pelaksanaannya belum sama di setiap bagian." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Statisi Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Kondisi ini terjadi karena belum ada sistem baku yang mengatur penggunaan arsip. Pencatatan biasanya hanya dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti pemeriksaan audit, sedangkan untuk kegiatan lainnya masih dilakukan secara informal." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Belum adanya petugas yang secara khusus menangani arsip turut memengaruhi kondisi ini. Tanpa petugas khusus, pengelolaan arsip, baik dalam penggunaan maupun pemeliharaannya, belum dapat dilakukan secara teratur." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Statisi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“kondisi ini disebabkan oleh belum adanya aturan tertulis yang mengatur pengelolaan arsip. Peminjaman arsip masih dilakukan berdasarkan konfirmasi dan kepercayaan.” (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan, prosedur, dan sistem baku yang tertulis dalam mengatur penggunaan, peminjaman, serta pemeliharaan arsip. Selain itu, ketiadaan petugas khusus yang menangani kearsipan menyebabkan pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan secara menyesuaikan kebutuhan masing-masing bagian. Akibatnya, praktik pengelolaan arsip tidak seragam, masih bersifat informal, dan sangat bergantung pada kepercayaan antarpegawai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pencatatan dan pemeliharaan arsip.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kegiatan penggunaan dan pemeliharaan arsip di lingkungan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dilakukan secara sederhana. Arsip belum dikelola dengan sistem pencatatan yang terstruktur, dan peminjaman arsip sering kali tidak didokumentasikan secara resmi. Selain itu, belum terlihat adanya pembagian tugas yang jelas terkait kearsipan, sehingga pengelolaan arsip dilakukan secara insidental oleh pegawai yang membutuhkan arsip tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pengelolaan arsip belum didukung oleh sarana, sistem, dan sumber daya manusia yang memadai.

Sementara itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya kesesuaian antara pernyataan narasumber dan kondisi di lapangan. Kurangnya aturan tertulis, belum adanya sistem baku, serta ketiadaan petugas khusus kearsipan terbukti berdampak langsung pada tidak optimalnya penggunaan dan pemeliharaan arsip. Praktik peminjaman arsip yang masih berbasis konfirmasi lisan dan kepercayaan memperlihatkan bahwa pengelolaan arsip belum dilaksanakan secara profesional dan terstandar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan tertulis, sistem pengelolaan arsip yang jelas, serta penunjukan petugas khusus agar kegiatan kearsipan dapat berjalan lebih tertib, teratur, dan akuntabel.

d. Pemahaman pegawai mengenai kearsipan yang belum merata

Kondisi ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya sosialisasi kearsipan secara khusus, terstruktur, dan menyeluruh kepada seluruh pegawai. Sosialisasi yang ada umumnya hanya disampaikan secara singkat dalam rapat atau terbatas pada pegawai tertentu, sehingga tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya arsip, prosedur pengelolaan arsip, serta tanggung jawab masing-masing dalam kegiatan kearsipan. Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal dan masih bergantung pada pemahaman individu pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Pemahaman pegawai belum merata karena sosialisasi kearsipan secara khusus tidak diikuti oleh seluruh pegawai. Hal ini disebabkan karena pengelolaan arsip selama ini dianggap sebagai tugas pegawai tertentu, khususnya Subbagian Umum dan pegawai yang ditugaskan, sehingga sosialisasi diprioritaskan kepada mereka. Sementara itu, pegawai lainnya hanya diberikan pengingat dalam rapat tanpa pendalaman materi." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Stasi Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Pemahaman pegawai belum merata karena sosialisasi kearsipan diprioritaskan kepada ketua tim, pengelola anggaran, dan pegawai bagian keuangan. Hal ini karena arsip yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan dinilai lebih membutuhkan pemahaman kearsipan, sedangkan pegawai lain dianggap cukup mengetahui secara umum melalui rapat." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Pemahaman pegawai belum merata karena sosialisasi kearsipan hanya diberikan kepada ketua tim. Pegawai lainnya tidak diikutsertakan karena sosialisasi dianggap cukup jika disampaikan secara berjenjang melalui ketua tim." (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramli, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Pemahaman pegawai belum merata karena sosialisasi khusus kearsipan diselenggarakan di tingkat provinsi dan pesertanya

terbatas. Pegawai lain tidak mengikuti karena peserta biasanya ditunjuk dan difokuskan kepada Subbagian Umum yang bertanggung jawab langsung terhadap arsip.” (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pemahaman pegawai mengenai kearsipan masih kurang efektif. Meskipun sosialisasi kearsipan sudah dilaksanakan, pelaksanaannya belum menyeluruh dan cukup terbatas karena hanya diprioritaskan kepada pegawai tertentu, seperti Subbagian Umum, ketua tim, serta pengelola administrasi dan keuangan. Akibatnya, pemahaman pegawai secara keseluruhan belum merata dan kurang mendalam.

Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan arsip di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan, namun pelaksanaannya belum efektif secara optimal. Kegiatan kearsipan masih terpusat pada Subbagian Umum, sementara pegawai di unit lain cukup memahami arsip sebatas kebutuhan kerja, tetapi kurang memahami prosedur teknis kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi dan penerapan kearsipan masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Walaupun kegiatan sosialisasi sudah dilakukan dan cukup membantu pegawai yang terlibat langsung, keterbatasan peserta menyebabkan pemahaman pegawai secara umum belum merata. Dengan demikian,

efektivitas pengelolaan kearsipan belum tercapai secara maksimal, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh agar efektivitas kearsipan dapat meningkat.

2. Faktor Pendukung

a. Pemanfaatan anggaran yang optimal dan maksimal

Pemanfaatan anggaran yang optimal dan maksimal ditunjukkan oleh tidak hanya tersedianya anggaran kearsipan, tetapi juga realisasi penggunaannya secara penuh sesuai dengan kebutuhan. Anggaran tersebut dimanfaatkan sejak tahap pengadaan awal sarana dan prasarana kearsipan, seperti lemari, rak, dan perlengkapan arsip lainnya, serta tetap dapat digunakan untuk penambahan sarana apabila terjadi kekurangan atau kerusakan. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran ini mencerminkan adanya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung pengelolaan arsip, karena anggaran tidak hanya dialokasikan, tetapi benar-benar digunakan untuk menunjang kelancaran dan keberlanjutan kegiatan kearsipan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, SST, M.P. selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

"Anggaran kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dimanfaatkan dengan sangat baik dan tepat sesuai kebutuhan. Anggaran operasional perkantoran dioptimalkan untuk pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, seperti rak dan kotak arsip, sehingga dapat menunjang pengelolaan arsip secara efektif." (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Agus Suharyanto, A.Md selaku Stasi Pelaksana Lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Anggaran kearsipan yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal, di mana seluruh alokasi anggaran direalisasikan untuk pengadaan sarana penyimpanan arsip sesuai dengan kebutuhan yang ada.” (Wawancara, 5 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan anggaran kearsipan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dimanfaatkan secara optimal. Apabila terdapat kekurangan sarana kearsipan, pengadaan tambahan dapat segera dilakukan agar pengelolaan arsip tetap berjalan dengan baik.” (Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Yulianti, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan anggaran kearsipan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Setiap kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dipenuhi melalui pengadaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.” (Wawancara, 7 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ekhsanti Anjelika Sakti, A.Md.Stat selaku Staff Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa:

“Anggaran kearsipan dimanfaatkan dengan baik untuk pengadaan perlengkapan dan sarana pendukung arsip. Penggunaan anggaran tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat mendukung pengelolaan arsip secara efektif.” (Wawancara, 3 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan dengan sangat baik, optimal, dan tepat sesuai kebutuhan. Anggaran kearsipan direalisasikan secara maksimal untuk pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, seperti rak, kotak, dan perlengkapan arsip lainnya. Selain itu, anggaran juga digunakan secara fleksibel untuk penambahan sarana apabila terjadi kekurangan, sehingga pengelolaan arsip dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, diketahui bahwa sarana dan prasarana kearsipan tersedia dan dimanfaatkan dengan baik. Rak dan perlengkapan arsip digunakan sesuai fungsinya dalam mendukung penyimpanan arsip, serta kondisi sarana relatif terawat. Apabila terdapat kekurangan atau kebutuhan tambahan sarana kearsipan, terlihat adanya upaya pemenuhan melalui pengadaan, yang menunjukkan bahwa dukungan anggaran kearsipan telah direalisasikan dalam praktik pengelolaan arsip.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Anggaran tidak hanya dialokasikan, tetapi juga direalisasikan secara nyata untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mendukung pengelolaan arsip, sehingga kegiatan

kearsipan dapat berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu seperti kondisi ruang penyimpanan.

b. Adanya arahan dan kebijakan dari pusat dan provinsi

Arahan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan arsip di daerah, khususnya dalam menentukan masa simpan dan pelaksanaan retensi arsip. Meskipun penerapannya di tingkat kabupaten belum sepenuhnya konsisten, keberadaan instruksi dari pusat memberikan kejelasan pedoman kerja bagi pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masdani, SE selaku Stasi Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jadwal retensi arsip di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengikuti arahan langsung dari pusat. Setiap kebijakan terkait masa simpan dan pengelolaan arsip mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPS pusat. Arahan dari pusat diikuti agar pengelolaan arsip tetap seragam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan antar daerah.” (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dita Dwi Wulan Sari, S. Tr. Stat selaku Pranata Komputer di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jadwal retensi arsip di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada arahan dari pusat. Kami berupaya konsisten mengikuti kebijakan tersebut dalam pengelolaan arsip yang ada agar pelaksanaan jadwal retensi arsip berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan serta memudahkan pengawasan dan evaluasi pengelolaan arsip” (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Safrian Fauzi, S. Tr. Stat selaku Stasi Pertama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Kami melaksanakan retensi arsip sesuai dengan arahan dari provinsi. Ketentuan yang diberikan oleh provinsi menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan retensi arsip di lingkungan kerja kami agar pelaksanaan retensi arsip di daerah tetap selaras dengan kebijakan pusat dan meminimalkan kesalahan dalam penentuan masa simpan arsip.”(Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Efatur Rahman, S.Pd.I selaku Penata Operasional Layanan Perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan jadwal retensi arsip di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diterapkan sesuai dengan arahan dari pusat. Arahan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan arsip agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai peraturan, serta mendukung akuntabilitas dan kelancaran administrasi organisasi.” (Wawancara, 14 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jadwal retensi arsip telah dilaksanakan dengan mengacu pada arahan dan kebijakan dari BPS pusat maupun provinsi. Seluruh informan menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa simpan dan pengelolaan arsip tidak ditetapkan secara mandiri oleh satuan kerja daerah, melainkan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan secara terpusat. Arahan tersebut dijadikan sebagai dasar agar pengelolaan arsip dapat berjalan seragam, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, serta untuk meminimalkan kesalahan dalam penentuan masa simpan arsip. Selain itu, penerapan arahan pusat juga dipandang memudahkan

pengawasan, evaluasi, dan mendukung akuntabilitas administrasi organisasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan arsip di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan adanya penerapan jadwal retensi arsip sesuai dengan pedoman yang berlaku. Arsip dikelola dengan memperhatikan masa simpan dan pengelompokan arsip sesuai ketentuan, meskipun dalam pelaksanaannya masih bersifat mengikuti arahan yang telah ditetapkan tanpa penyesuaian lebih lanjut di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retensi arsip lebih berfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan pusat, sehingga proses pengelolaan arsip cenderung seragam dan terstandar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jadwal retensi arsip di BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPS pusat dan provinsi. Kepatuhan terhadap arahan tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan kebijakan kearsipan dan mendukung terciptanya keseragaman pengelolaan arsip antar daerah. Namun, pelaksanaan retensi arsip masih bergantung sepenuhnya pada arahan pusat, sehingga inisiatif pengembangan atau penyesuaian kebijakan di tingkat daerah belum terlihat secara signifikan. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa penerapan jadwal retensi arsip sudah berjalan dengan cukup efektif dalam menjaga ketertiban administrasi, meskipun masih memerlukan

penguatan dari sisi pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan di tingkat satuan kerja.

